

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Landasan Teori

2.1.1 Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan merupakan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang yang menempati posisi sebagai pemimpin dalam suatu pekerjaan untuk memengaruhi tindakan orang lain, khususnya bawahannya, agar berpikir dan bertindak dengan cara tertentu sehingga melalui perilaku positif tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam mencapai tujuan organisasi (Hutahaean, 2021). Sejalan dengan pandangan tersebut, Wexley dan Yukl (dalam Setyaasih, 2024) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses memengaruhi orang lain agar mengerahkan usaha yang lebih besar dalam menjalankan tugasnya maupun mengubah perilaku mereka. Dengan demikian, kepemimpinan dapat dipahami sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara pemimpin dan pengikut, di mana pengaruh menjadi unsur utama dalam mencapai tujuan organisasi maupun tujuan kolektif.

Kepemimpinan karismatik merupakan tipe kepemimpinan yang ditandai dengan kemampuan seorang pemimpin untuk memengaruhi serta menginspirasi orang lain melalui daya tarik pribadi, karakter, dan visi yang kuat. Pemimpin dengan karakter ini mampu membangun ikatan emosional yang mendalam dengan para pengikutnya sehingga dipandang sebagai sosok yang menginspirasi dan dihormati. Daya tarik yang dimiliki pemimpin karismatik sering kali sulit dijelaskan

secara konkret karena masyarakat cenderung melihatnya sebagai individu yang mempunyai aura atau pesona khusus yang membuatnya berbeda dari yang lain. Selain itu, mereka biasanya memancarkan rasa percaya diri, keberanian, dan keteguhan dalam mencapai tujuan sehingga mampu mendorong orang lain untuk mengikuti arah kepemimpinannya. Dalam praktiknya, pemimpin karismatik juga tidak selalu berfokus pada nilai-nilai tertentu maupun pada gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter (Setyaasih, 2024).

Menurut Mattayang (dalam Setyaasih, 2024) para pengikut cenderung tetap setia dan terus mengikuti seorang pemimpin karena adanya kedekatan emosional yang terjalin, serta kepercayaan terhadap visi dan tujuan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Secara umum, pemimpin karismatik memiliki kekuatan dalam memimpin dan menginspirasi orang lain melalui daya tarik pribadinya, sekaligus kemampuan untuk mempererat hubungan emosional dengan para pengikutnya (Setyaasih, 2024). Dalam konteks ini, karisma berperan sebagai sumber pengaruh yang mampu memperkuat rasa percaya dan komitmen pengikut. Selain itu, pemimpin karismatik juga memiliki kemampuan untuk menyampaikan nilai-nilai dan gagasan secara jelas sehingga dapat memengaruhi cara berpikir maupun bertindak para pengikutnya (Hutahayan, 2020).

Teori kepemimpinan karismatik merupakan konsep kepemimpinan yang menekankan bahwa kemampuan seorang pemimpin dalam memengaruhi pengikutnya tidak semata-mata berasal dari tradisi atau otoritas formal, melainkan dari persepsi pengikut yang melihat pemimpin tersebut memiliki kemampuan luar biasa atau bahkan bersifat supranatural. Menurut Max Weber, pemimpin karismatik

adalah individu yang memiliki daya tarik dan talenta istimewa sehingga mampu memikat pengikutnya secara kuat. Sementara itu, Robert House mendefinisikan pemimpin karismatik sebagai sosok yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, keyakinan yang kuat, idealisme, serta kemampuan untuk memengaruhi orang lain. Adapun menurut Conger dan Kanungo, kepemimpinan karismatik terjadi ketika para pengikut terdorong untuk menunjukkan kemampuan luar biasa setelah mengamati perilaku tertentu yang ditampilkan oleh pemimpinnya. (Hutahaean, 2021).

Teori kepemimpinan karismatik pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber. Istilah “karismatik” berasal dari kata Yunani *karimos*, yang berarti seseorang yang diberkahi atau memperoleh inspirasi agung, serta dimaknai sebagai anugerah dari para dewa kepada individu tertentu. Dengan demikian, pemimpin karismatik adalah sosok yang memiliki daya tarik pribadi yang luar biasa sehingga mampu memengaruhi pikiran, kehendak, perasaan, hingga tindakan para pengikutnya. Kepemimpinan ini tidak bertumpu pada otoritas formal atau kekuasaan eksternal, melainkan pada kekuatan daya tarik personal yang dimiliki pemimpin tersebut (Hutahaean, 2021).

Weber (1978) mengungkapkan Kepemimpinan karismatik (*charismatic authority*) menjadi suatu bentuk otoritas yang bersumber dari keyakinan pengikut terhadap kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seorang individu. Kualitas tersebut dianggap tidak dimiliki oleh orang pada umumnya dan dipersepsikan sebagai kemampuan istimewa, heroik, atau bahkan bersifat transendental. Kualitas tersebut sering kali dipersepsikan berasal dari sumber ilahi atau dipandang sebagai teladan

yang ideal, sehingga individu yang memilikinya diakui dan diterima sebagai seorang pemimpin. Penilaian terhadap kualitas karisma tersebut baik dari sudut pandang etika, estetika, maupun aspek lainnya pada dasarnya tidak menjadi fokus utama dalam pendefinisian. Yang terpenting adalah bagaimana individu tersebut dipersepsikan dan diakui oleh mereka yang berada di bawah otoritasnya, yaitu para pengikut atau muridnya.

Weber (1978) menegaskan bahwa karisma bukanlah sifat objektif yang melekat secara permanen pada individu, melainkan hasil dari pengakuan sosial yang diberikan oleh para pengikut. Selama pemimpin karismatik mampu memenuhi harapan dan membuktikan kapasitas kepemimpinannya, legitimasi karismatik akan tetap bertahan. Sebaliknya, apabila pemimpin gagal menunjukkan kualitas luar biasa tersebut, maka legitimasi karismatik dapat melemah atau bahkan hilang.

Weber (dalam Hutahayan, 2020) juga menjelaskan bahwa kepemimpinan karismatik umumnya muncul dalam situasi krisis, baik sosial, politik, maupun ekonomi. Dalam kondisi tersebut, seorang pemimpin hadir dengan membawa visi yang bersifat radikal sebagai solusi atas permasalahan yang ada, sehingga mampu menarik kepercayaan dan dukungan dari para pengikutnya. Keberhasilan awal dalam merealisasikan visi tersebut kemudian memperkuat keyakinan pengikut bahwa pemimpin memiliki kemampuan yang luar biasa, yang pada akhirnya semakin memperkuat legitimasi karismatiknya.

Menurut Weber (1978), kepemimpinan karismatik memiliki sejumlah karakteristik utama. Pertama, kepemimpinan karismatik bersifat personalistik, yaitu berpusat pada figur individu pemimpin, bukan pada institusi atau aturan formal.

Kedua, hubungan antara pemimpin dan pengikut bersifat emosional, ditandai oleh rasa kagum, loyalitas, dan kepercayaan yang kuat. Ketiga, kepemimpinan karismatik cenderung bersifat anti-birokratis karena tidak bergantung pada prosedur administratif yang kaku.

Selain itu, Weber (1978) menyatakan bahwa kepemimpinan karismatik memiliki sifat revolusioner, karena mampu mengubah tatanan sosial dan politik yang telah mapan. Pemimpin karismatik sering kali menolak struktur birokrasi dan rutinitas harian, serta menciptakan ikatan emosional intens antara pemimpin dan pengikut yang rela mengorbankan kepentingan pribadi demi misi historis atau ilahi pemimpin tersebut. Karisma sering kali tampil dalam bentuk daya tarik personal, kemampuan komunikasi yang kuat, keteladanan moral, serta kemampuan pemimpin dalam mengartikulasikan visi dan harapan masyarakat.

Robert House kemudian mengembangkan pemikiran Weber (dalam Hutahaean, 2021) dengan merumuskan teori kepemimpinan karismatik secara lebih ilmiah pada tahun 1977. Ia menekankan bahwa seorang pemimpin karismatik harus mampu berkomunikasi secara persuasif serta memotivasi para pengikutnya. Teori yang dikemukakan oleh Robert House menyoroti pentingnya identifikasi pribadi antara pemimpin dan pengikut, kemampuan pemimpin dalam membangkitkan motivasi, serta pengaruhnya terhadap tujuan dan rasa percaya diri para pengikut. Selain itu, House juga menjelaskan bahwa kepemimpinan karismatik melibatkan proses yang dapat diamati secara nyata, sehingga bukan sekadar konsep abstrak atau cerita semata.

Sejalan dengan House, Conger dan Kanungo dalam Hutahayan (2020)

mengembangkan teori kepemimpinan karismatik yang menekankan karisma sebagai fenomena atribusi. Menurut teori tersebut, penilaian pengikut terhadap kualitas karismatik seorang pemimpin ditentukan oleh perilaku dan keterampilan pemimpin, serta kondisi situasi yang dihadapi. Dalam menarik dukungan para pengikut, terdapat tiga asumsi utama yang menjadi dasar kepemimpinan karismatik, yaitu :

- 1) Daya tarik dan keanggunan merupakan modal yang dibutuhkan untuk menarik pengikut,
- 2) Rasa percaya diri adalah kebutuhan dasar dari seorang pemimpin, dan
- 3) Pengikut akan mengikuti orang-orang yang mereka kagumi.

Dalam sistem demokrasi, kepemimpinan karismatik memainkan peran penting dalam membentuk preferensi dan perilaku politik masyarakat. Weber menjelaskan bahwa karisma dapat bertransformasi ke dalam bentuk legitimasi demokratis melalui mekanisme pemilihan umum, di mana dukungan rakyat menjadi sarana aklamasi terhadap figur pemimpin karismatik (Weber, 1978). Dalam konteks ini, pemilihan umum tidak hanya berfungsi sebagai prosedur formal, tetapi juga sebagai arena pengakuan terhadap legitimasi kepemimpinan.

Adapun atribut yang menjadi penilaian anggota terhadap pemimpin karismatik menurut Yukl (dalam Hutahayan, 2020) :

- 1) Perilaku pemimpin
 - a) Visioner Dan Menarik
 - b) Daya Tarik Emosional Terhadap Nilai
 - c) Perilaku Non Konvensional

- d) Pengorbanan Diri
- 2) Proses pengaruh
 - a) Proses pengaruh utama merupakan identitas pribadi
 - b) Pengaruh berdasarkan keinginan dari individu untuk mengikuti pemimpin dan tidak mengecewakannya
 - c) Persetujuan pemimpin menjadi bagian penting dalam validitas dan memberikan motivasi dalam bekerja
- 3) Kondisi yang memfasilitasi
 - a) Situasi krisis
 - b) Tugas yang kompleks
 - c) Kelemahan dan ketergantungan pengikut

Pada konteks pemilihan kepala daerah, kepemimpinan karismatik menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Calon tunggal umumnya memiliki modal simbolik berupa pengalaman kepemimpinan, visibilitas publik yang tinggi, serta rekam jejak kinerja yang telah dikenal oleh masyarakat. Dalam perspektif Weberian, kondisi tersebut dapat memperkuat legitimasi karismatik karena masyarakat memiliki pengalaman empiris terhadap kualitas kepemimpinan calon tersebut.

Kepercayaan publik terhadap figur yang dianggap berhasil, dekat dengan rakyat, serta memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat dapat mendorong masyarakat untuk tetap berpartisipasi dalam pemilu, meskipun pilihan politik bersifat terbatas. Dalam situasi ini, partisipasi politik tidak semata-mata didorong oleh kompetisi politik, tetapi juga oleh loyalitas personal dan kepercayaan terhadap

figur pemimpin.

Calon tunggal dalam Pilkada yang umumnya memiliki modal simbolik dan pengalaman kepemimpinan lebih kuat dibandingkan kandidat baru. Dalam perspektif Weberian, kondisi tersebut dapat memperkuat legitimasi karismatik, karena masyarakat telah memiliki pengalaman empiris terhadap kinerja dan gaya kepemimpinan calon tersebut. Keberhasilan dalam menjalankan pemerintahan sebelumnya dapat memperkuat persepsi masyarakat terhadap kualitas luar biasa yang dimilikinya.

Weber (1978) menekankan bahwa legitimasi karismatik bersifat tidak stabil dan memerlukan proses rutinisasi agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam konteks demokrasi, tingkat partisipasi politik yang tinggi dalam pemilihan calon tunggal dapat dipandang sebagai indikator kuatnya legitimasi karismatik, yang kemudian berpotensi bertransformasi menjadi legitimasi legal-rasional pasca pemilu. Dengan demikian, kepemimpinan karismatik dapat dipahami sebagai faktor penting yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024.

2.1.2 Partisipasi Politik

Partisipasi berasal dari bahasa Inggris *participation* yang berarti keikutsertaan atau keterlibatan seseorang dalam suatu kegiatan. Dengan demikian, partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas atau proses, baik melalui pemikiran, tenaga, waktu, emosi, keahlian, maupun materi, guna mencapai tujuan bersama serta turut bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh.

Dalam konteks politik, partisipasi politik menjadi salah satu unsur penting dalam sistem demokrasi. Miriam Budiardjo (2008) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas individu atau kelompok untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik, seperti memilih pemimpin negara dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk kegiatannya meliputi pemberian suara dalam pemilu, menghadiri rapat umum, melakukan komunikasi atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah maupun anggota parlemen, menjadi anggota partai politik atau gerakan sosial, dan berbagai tindakan politik lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, partisipasi politik dapat dipahami sebagai seluruh aktivitas warga negara dalam memengaruhi atau terlibat dalam proses politik, baik melalui jalur formal seperti pemilu maupun jalur informal seperti demonstrasi dan penyampaian opini publik.

Sidney Verba dan Norman H. Nie (1972) mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas legal yang dilakukan warga negara dengan tujuan memengaruhi pemilihan pejabat negara atau kebijakan yang mereka ambil. Mereka juga menegaskan bahwa partisipasi politik merupakan tindakan nyata individu untuk memengaruhi keputusan pihak yang menduduki jabatan pemerintahan. Definisi ini menekankan bahwa partisipasi politik merupakan bentuk keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik di dalam sistem demokrasi.

Menurut Herbert McClosky (dalam Budiardjo, 2008), partisipasi politik adalah kegiatan sukarela warga negara untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik. Bentuk partisipasi tersebut dapat berupa memberikan suara dalam pemilu, bergabung dengan partai politik,

hingga ikut serta dalam gerakan sosial maupun kegiatan advokasi. (McClosky, 1972).

Sementara itu, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam Budiardjo (2008), mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara, baik secara individu maupun kolektif, yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi tersebut dapat bersifat terorganisasi atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, dilakukan secara damai maupun dengan kekerasan, serta melalui jalur legal ataupun ilegal. Selain itu, Huntington dan Joan Nelson (1994) juga menjelaskan bahwa partisipasi politik mencakup seluruh aktivitas yang memiliki relevansi politik atau bertujuan memengaruhi pejabat pemerintah dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik merupakan seluruh bentuk aktivitas warga negara yang bertujuan memengaruhi proses politik dan pengambilan keputusan pemerintah, baik melalui mekanisme formal seperti pemilu maupun melalui saluran informal seperti aksi sosial dan penyampaian aspirasi publik.

Teori Verba & Nie (1972) menjelaskan bahwa partisipasi politik seseorang dipengaruhi oleh tiga kategori utama yaitu hasil interaksi antara sumber daya individu (*resources*), motivasi (*motivation*), dan kesempatan (*opportunity*). Dari sisi *motivation*, Kesadaran politik, minat terhadap isu politik, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Masyarakat mungkin merasa tidak termotivasi untuk ikut memilih karena hasil sudah bisa diprediksi. Dari sisi *opportunity*, Ketersediaan saluran atau mekanisme untuk berpartisipasi, seperti sistem pemilu yang terbuka,

kebebasan politik, serta kondisi sosial yang mendukung. Dalam konteks calon tunggal, faktor kesempatan dan motivasi menjadi penting karena masyarakat mungkin merasa kesempatan untuk memilih terbatas (tidak ada alternatif calon), yang berdampak pada menurunnya motivasi untuk berpartisipasi.

Mengacu pada teori partisipasi politik Sidney Verba (1972), partisipasi politik dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan individu untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Verba dan Nie (1972), juga menjelaskan bahwa tingkat partisipasi politik cenderung menurun ketika seseorang berpindah dari wilayah kecil atau pedesaan ke kota besar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi sosial antara desa dan kota. Di wilayah pedesaan, hubungan kekerabatan masyarakat umumnya lebih erat sehingga interaksi sosial berlangsung lebih intens. Sebaliknya, kehidupan politik di perkotaan dianggap lebih kompleks dan kurang menjadi perhatian masyarakat, sehingga tingkat partisipasi politik cenderung menurun (Miaz, 2012).

Menurut Verba dan Nie (1972), partisipasi politik dapat dibedakan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:

- 1) *Voting* (memilih), ikut serta dalam pemilihan umum. Partisipasi dalam pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik yang paling umum dan memiliki cakupan luas. Melalui pemilu, masyarakat menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin serta memengaruhi kebijakan pemerintah.
- 2) *Campaign activity* (kegiatan kampanye), terlibat dalam kegiatan kampanye

politik. Keterlibatan dalam kegiatan kampanye politik termasuk bentuk partisipasi yang lebih aktif, baik melalui kegiatan informal maupun gerakan sosial. Bentuk kegiatannya dapat berupa membantu kampanye, menyebarkan informasi politik, atau menjadi bagian dari tim sukses kandidat tertentu.

- 3) *Contacting officials* (menghubungi pejabat), menghubungi pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi. Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara menghubungi pejabat publik untuk menyampaikan aspirasi, kritik, keluhan, maupun saran. Aktivitas ini menunjukkan keterlibatan warga negara dalam urusan politik secara personal dengan tingkat partisipasi yang relatif lebih rendah dibanding bentuk lainnya.
- 4) *Communal activity* (kegiatan masyarakat), ikut dalam kegiatan masyarakat untuk kepentingan bersama. Partisipasi ini diwujudkan melalui keterlibatan dalam kegiatan masyarakat yang bertujuan untuk kepentingan bersama, seperti bergabung dalam partai politik, organisasi masyarakat, maupun kelompok kepentingan yang memiliki tujuan politik tertentu.

Berbagai-bentuk partisipasi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan politik warga negara tidak hanya terbatas pada pemberian suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai aktivitas lain yang berkontribusi terhadap proses politik.

Selain itu, Sidney Verba dan Norman H. Nie dalam bukunya yang berjudul *Participation in America: Political Democracy and Social Equality* menjelaskan beberapa faktor yang memengaruhi partisipasi politik, yaitu sumber daya,

keterlibatan psikologis, aksesibilitas jaringan sosial, dan mobilisasi.

- 1) Sumber Daya (*Resource*). Partisipasi politik dipengaruhi oleh akses individu terhadap sumber daya, seperti waktu, uang, dan keterampilan. Individu yang memiliki sumber daya lebih besar cenderung lebih aktif dalam kegiatan politik.
- 2) Keterlibatan Psikologis (*Psychological Engagement*). Faktor ini mencakup minat, kesadaran politik, dan rasa memiliki terhadap komunitas politik. Semakin tinggi ketertarikan dan keterlibatan psikologis seseorang terhadap politik, maka semakin besar kecenderungannya untuk berpartisipasi.
- 3) Aksesibilitas Jaringan Sosial (*Social Networks*). Jaringan sosial, seperti keluarga, teman, maupun organisasi, dapat memengaruhi partisipasi politik seseorang. Jaringan tersebut berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus dorongan untuk terlibat dalam aktivitas politik.
- 4) Mobilisasi (*Mobilization*). Partisipasi politik juga dipengaruhi oleh upaya mobilisasi yang dilakukan partai politik, kelompok kepentingan, atau organisasi tertentu yang mengajak masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan politik.

Selain faktor-faktor tersebut, lingkungan sosial dan demografis seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan juga memengaruhi tingkat partisipasi politik. Kesempatan struktural yang disediakan oleh sistem politik, seperti keterbukaan sistem pemilu dan akses terhadap informasi politik, turut menentukan intensitas partisipasi warga negara.

Selain itu, Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan adanya spektrum

dalam partisipasi politik. Menurut mereka, partisipasi politik terbagi ke dalam dua jenis utama yang berada dalam satu garis spektrum, yaitu partisipasi otonom (*autonomous participation*) dan partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*).

Partisipasi otonom merupakan bentuk partisipasi yang ideal dalam kehidupan demokrasi. Pada jenis ini, masyarakat secara sadar dan sukarela terlibat dalam aktivitas politik, seperti memberikan masukan kepada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan (*pressure group*), serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Bentuk partisipasi ini lahir dari kesadaran politik masyarakat tanpa adanya tekanan dari pihak lain.

Sementara itu, partisipasi yang dimobilisasi lebih menekankan pada dukungan masyarakat terhadap program-program politik, ekonomi, maupun sosial yang digerakkan oleh pihak tertentu. Dalam bentuk partisipasi ini, pengaruh manipulasi atau tekanan dari pihak lain, baik negara maupun kelompok tertentu, memiliki peranan yang cukup besar terhadap keterlibatan individu maupun kelompok. Dalam pandangan Loekman Soetrisno (1992) disebutkan, "Kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah".

Selain itu, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa partisipasi politik hanya mencakup aktivitas yang bersifat positif. Akan tetapi Huntington dan Nelson (dalam Budiardjo, 2008) berpendapat bahwa tindakan yang mengandung unsur destruktif, seperti demonstrasi, teror, maupun pembunuhan politik, juga dapat dikategorikan sebagai bentuk partisipasi politik karena tetap bertujuan

memengaruhi proses dan keputusan politik.

Tidak semua warga negara terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Sebagian masyarakat menunjukkan sikap tidak peduli atau apatis terhadap politik, yaitu kondisi ketika individu tidak memiliki ketertarikan maupun keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas politik. Sikap apatis ini dapat disebabkan oleh rendahnya pemahaman politik, kurangnya kepercayaan terhadap efektivitas partisipasi, atau anggapan bahwa keterlibatan politik tidak akan membawa perubahan yang berarti (Budiardjo, 2008).

McClosky (dalam Budiardjo, 2008) bahkan memandang sikap apatis sebagai sesuatu yang dapat bernilai positif karena memberikan fleksibilitas bagi sistem politik. Kondisi tersebut dianggap lebih baik dibanding masyarakat dengan tingkat partisipasi yang berlebihan, di mana warga terlalu aktif hingga berpotensi memicu pertikaian, fragmentasi, dan instabilitas politik sebagai bentuk ketidakpuasan sosial.

Di sisi lain, seseorang mungkin memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena merasa kondisi politik yang ada tidak terlalu buruk dan siapa pun yang terpilih tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Dalam pandangan ini, sikap “apatis” bukanlah bentuk kekecewaan atau frustrasi, melainkan cerminan rasa puas dan kepercayaan terhadap sistem politik yang sedang berjalan (Budiardjo, 2008).

Dalam konteks Pilkada dengan calon tunggal, ruang partisipasi politik masyarakat cenderung lebih terbatas karena tidak adanya alternatif kandidat yang dapat dipilih. Situasi ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap

pentingnya partisipasi politik, khususnya dalam bentuk pemberian suara. Mengacu pada teori Verba dan Nie (1972), keterbatasan kesempatan politik (*opportunity*) serta menurunnya motivasi (*motivation*) menjadi faktor penting yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada calon tunggal.

Meskipun demikian, masyarakat yang memiliki sumber daya dan kesadaran politik yang tinggi tetap dapat berpartisipasi sebagai bentuk tanggung jawab warga negara dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, partisipasi politik dalam Pilkada calon tunggal dapat dipahami sebagai hasil interaksi antara sumber daya individu, keterlibatan psikologis, jaringan sosial, dan kesempatan politik yang tersedia dalam sistem politik yang berlaku.

2. 2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu rujukan penting dalam penyusunan penelitian ini, karena berfungsi untuk memperkaya referensi sekaligus memperkuat landasan teoritis yang digunakan. Berbagai hasil penelitian sebelumnya dijadikan acuan guna mendukung analisis serta memperluas kajian dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan berasal dari jurnal maupun penelitian lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Pengaruh Figur Calon Pemimpin Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat	(Rahmawati, 2016)	Metode survei	Hasil menunjukkan bahwa peningkatan kredibilitas dan kemampuan	Lebih umum pada figur calon kompetitif kota, bukan spesifik karismatik

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kelurahan Sunter Agung, Pada Pemilukada DKI Jakarta 2012			dapat menjadi strategis dalam meningkatkan partisipasi politik di antara warga negara.	atau calon tunggal kabupaten seperti Ciamis 2024.
2	Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa	(Irliandi, Normansyah, & Sukarlina, 2023)	Pendekatan kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa tokoh masyarakat secara signifikan mempengaruhi partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa, menyumbang 23,3% terhadap tingkat partisipasi keseluruhan.	Skala desa kecil, variabel "tokoh masyarakat" umum (bukan karismatik spesifik), bukan Pilkada kabupaten kompetitif/cal on tunggal.
3	Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengnga e Kabupaten Sidenreng Rappang	(Mustanir & Jaya, 2016)	Deskriptif kuantitatif	Penelitian ini mengungkapkan bahwa 75,5% responden menganggap kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi pengikut mereka sebagai efektif, menyoroti persepsi positif tentang kualitas kepemimpinannya	Multi-variabel deskriptif (bukan pure karismatik), konteks budaya etnis lokal bukan Pilkada umum. Populasi pemilih lingkup sempit, bukan secara luas mencakup DPT kabupaten seperti

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				n.	Ciamis.
2	Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang	(Eti, 2018)	Deskriptif kuantitatif.	Penelitian menemukan pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang lebih baik berkorelasi dengan peningkatan partisipasi masyarakat.	Fokus non-elektoral (pembangunan), bukan Pilkada atau karismatik spesifik.
3	Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Di Desa Beji Kecamatan Junrejo Kota Batu)	(Hilde & Purwatiningsih, 2019)	Deskriptif kuantitatif	Penelitian menemukan bahwa kepemimpinan di Desa Beji secara signifikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan efek positif.	Serupa non-elektoral desa, tanpa elemen karismatik atau Pilkada.
4	<i>Charismatic Leadership Impact on Employee Psychological Engagement: Evidence from Travel</i>	(Maher, 2017)	Metode Kuantitatif	Penelitian ini menemukan korelasi positif antara perilaku kepemimpinan karismatik dan keterlibatan	Konteks korporat non-politik, bukan partisipasi masyarakat elektoral.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
	<i>Companies</i>			psikologis karyawan di perusahaan perjalanan, menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan partisipasi karyawan.	
5	<i>The Impact of Charismatic Leadership Style on Intrinsic Motivation, Performance and Job Satisfaction of the Employees</i>	(Alsomait, 2016)	Metode Kuantitatif	Penelitian ini menyoroti bahwa pemimpin karismatik menumbuhkan lingkungan yang aman secara psikologis, yang meningkatkan keterlibatan karyawan, kreativitas, dan produktivitas	Fokus organisasi swasta, bukan politik atau partisipasi publik.
6	<i>The influence of charismatic leadership on followers' attentional processes</i>	(Engelbert, Elk, Theeuwes, & Vugt, 2025)	<i>Experiment</i>	Penelitian menemukan bahwa peserta menghabiskan lebih banyak waktu membaca pesan dari pemimpin berkarisma tinggi dibandingkan dengan pemimpin rendah	Metode eksperimental psikologis, bukan survei elektoral empiris.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				karisma, terutama dalam Studi 1, yang berfokus pada keseluruhan pesan	
7	Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik Kepala Madrasah Terhadap Motivasi Kerja Guru Di Madrasah Aliyah Hidayatul Muntadiin Sidoharjo Jati Agung Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2020/2021	(Hayati, Widiatuti, & Aslamiyah, 2021)	Metode kuantitatif	Studi ini menemukan bahwa kepemimpinan karismatik kepala sekolah memiliki pengaruh pada motivasi kerja guru di Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin, menunjukkan hubungan positif antara kedua variabel.	Konteks pendidikan formal, bukan Pilkada atau partisipasi politik.
8	Pengaruh Kepemimpinan Karismatik Terhadap Etos Kerja <i>Stakeholder</i> Pada Pondok Pesantren Modern Man Ana Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor	(Ihsan, Romli, & Firdaus, 2022)	Metode Kuantitatif	Penelitian menemukan bahwa kepemimpinan karismatik memiliki efek positif pada etos kerja para pemangku kepentingan di Modern Man Ana Islamic <i>Boarding School</i> , dengan	Tidak meneliti tentang kepemimpinan karismatik calon tunggal dan partisipasi politik, perbedaan lokasi penelitian

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				koefisien beta (β) 0,269 dan nilai signifikansi 0,034, menunjukkan hubungan yang signifikan. Temuan menunjukkan bahwa peningkatan kepemimpinan karismatik berkorelasi dengan peningkatan etos kerja pemangku kepentingan.	
9	Pengaruh Kepemimpinan Karismatik, Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan (Studi Pada Lembaga Tingkat SLTA Dan SLTP Yayasan Darut Taqwa)	(Yusuf, Pengaruh Kepemimpinan Karismatik, Lingkungan Kerja Dan Kompensasi Terhadap Loyalitas Karyawan (Studi Oada Lembaga Tingkat SLTA dan SLTP Yayasan Darut Taqwa), 2022)	Pendekatan kuantitatif	Penelitian ini menyoroti bahwa kepemimpinan karismatik memiliki dampak signifikan pada anggotanya, yang mengarah pada perubahan sikap dan nilai. Anggota mengalihkan fokus mereka dari kepentingan pribadi ke tujuan kolektif	Objek yang diteliti bukan calon tunggal, tidak menggunakan variabel partisipasi politik, lokasi berbeda.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				secara konsisten.	
10	Pengaruh Kepemimpinan Karismatik Tuan Guru Terhadap Pembentukan Karakter Santri Di Lingkungan Pesantren	(Sapari, Citradin, & Syaharuddin, 2025)	Metode Kuantitatif Korelasional	Penelitian menunjukkan pengaruh signifikan kepemimpinan karismatik Tuan Guru terhadap pembentukan karakter santri, dengan koefisien regresi 0,428 dan tingkat signifikansi $p=0,010$.	Perbedaan objek penelitian, tidak menggunakan calon tunggal dan partisipasi politik, perbedaan lokasi.
11	Pengaruh Tingkat Melek Politik Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kecamatan Amuntai Tengah	(Khairunnisa, Jumaidi, & Noorahman, 2025)	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tingkat Melek Politik berpengaruh terhadap Partisipasi Masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dapat menyebabkan peningkatan tingkat partisipasi di antara pemilih baru.	Tidak meneliti calon tunggal, objek berbeda, fokus pada <i>literasi/melek</i> politik, perbedaan lokasi penelitian
12	Pengaruh <i>Literasi</i>	(Katarudin & Putri, 2020)	Metode survei	Studi ini menemukan	Fokus pemilih

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018		dengan pendekatan kuantitatif.	bahwa <i>literasi</i> politik secara signifikan mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan daerah 2018 di Kota Pariaman menyoroti pentingnya teknologi dalam meningkatkan <i>literasi</i> .	pemula, variabel tidak meneliti dengan calon tunggal, lokasi penelitian berbeda.
13	Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Desa Serangan	(Herlambang & Riyanto, 2022)	Metode Kuantitatif	Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Serangan dalam Pilkada Demak tahun 2020.	Fokus pada pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik, menggunakan variabel pendidikan, bukan calon tunggal, lokasi penelitian berbeda.
14	Pengaruh Politik Uang Terhadap Partisipasi Pemilih Pemilukada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wajo Tahun 2018	(Hawing, Fadillah, & Parawu, 2020)	Pendekatan Kuantitatif	Berdasarkan hasil analisis regresi secara simultan atau kesuluruhan memperoleh hasil sebesar 53% yang menunjukkan, bahwa variabel	Fokus pada pengaruh politik uang terhadap partisipasi pemilih, tidak membahas calon tunggal, lokasi

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				politik uang (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik (Y) pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018.	penelitian berbeda.
15	Pengaruh Penemuan Informasi Dalam Literasi Media IG Terhadap Keinginan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pilkada 2024 di Kecamatan Megamendung.	(Seputro, Agustini, & Ruhimat, 2024)	Pendekatan Kuantitatif	Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penemuan informasi dalam literasi media IG terhadap keinginan partisipasi politik pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kecamatan Megamendung. artinya dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang paling dominan dari tingkat literasi media IG adalah menemukan	Fokus pada Dampak literasi media IG terhadap keinginan berpartisipasi , Tidak meneliti fenomena calon tunggal, dan lokasi penelitian berbeda.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				informasi yang mempengaruhi keinginan partisipasi politik pemilih pemula.	
16	Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik di Masa Pandemi Covid-19 dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020	(Sadeli, Sukma, Fajar, & Faridli, 2022)	pendekatan kuantitatif deskriptif	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik di masa pandemi COVID 19 masyarakat Desa Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya dalam pemilihan kepada daerah 2020.	Fokus pada pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi saat pandemi, Tidak menyinggung calon tunggal, lokasi penelitian berbeda.
17	Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lampung Selatan: Telaah Pengaruh Pendidikan Politik, Komunikasi Politik Dan Sosial Ekonomi	(Tamara, Darmastuti, & Warganegara, 2020)	Pendekatan kuantitatif	Studi ini mengungkapkan bahwa pengaruh keseluruhan pendidikan politik, komunikasi, dan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik adalah	Fokus pada Pengaruh pendidikan politik, komunikasi, dan sosial ekonomi, Tidak ada variabel calon tunggal, fokus multi-variabel sosial.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Terhadap Partisipasi Politik			51,2%, menyoroti efek gabungan yang signifikan. Adanya pengaruh secara simultan pendidikan politik, komunikasi politik dan status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik	
18	Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Politik Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Masyarakat Kecamatan Langensari Kota Banjar Tahun 2018	(Purnama & Dewi, 2020)	Pendekatan Kuantitatif	Ditentukan bahwa status sosial ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah 2018, menunjukkan bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting dalam keterlibatan sipil.	Fokus pada pengaruh sosial ekonomi terhadap partisipasi politik, tidak meneliti calon tunggal, lokasi berbeda.
19	Pengaruh Persepsi Kepemimpin	(Fauziah & Lindiawatie, 2023)	Kuantitatif Asosiatif	Persepsi kepemimpinan karismatik	Penelitian terdahulu berada di

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
	an Karismatik dan Motivasi Kepala Sekolah terhadap Disiplin Kerja Guru di Sekolah Tugu Ibu Depok			secara parsial tidak mempengaruh i disiplin kerja guru pada Sekolah Dasar Tugu Ibu Depok. menunjukkan kesenjangan dalam memahami bagaimana persepsi ini diterjemahkan ke dalam hasil perilaku aktual dalam pengaturan pendidikan.	bidang pendidikan, sedangkan penelitian ini di bidang politik lokal Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024.
20	Pengaruh Kepemimpin an Karismatik, Perceived Organization al Support, Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Komitmen Organisasi Pada Perusahaan Manufaktur Pt. Adidaya Tangguh Pulau Taliabu	(Astriyani, Pandowo, & Saerang, 2026)		Kepemimpina n karismatik secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi karyawan. Hal ini dapat diinterpretasi kan bahwa gaya kepemimpina n yang karismatik, yang berfokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi dan	variabel dependen dan konteks penelitian, di mana penelitian ini menggunaka n komitmen organisasi, sedangkan penelitian penulis menggunaka n partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

No .	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian	Perbedaan Penelitian
				memberikan visi, belum sepenuhnya berhasil membentuk keterikatan emosional dan loyalitas karyawan di perusahaan ini.	

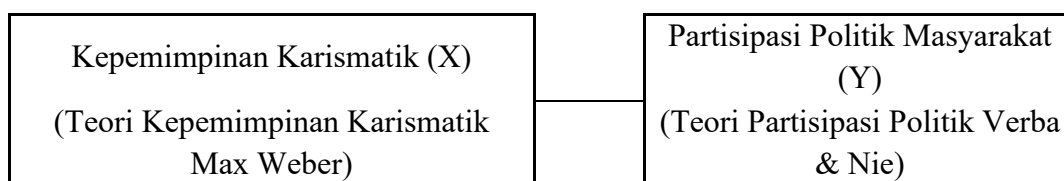
Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara kepemimpinan dan partisipasi politik masyarakat. Penelitian mengenai kepemimpinan karismatik umumnya menunjukkan bahwa figur pemimpin yang memiliki karisma mampu membangun kepercayaan dan loyalitas pengikut, sehingga berpengaruh terhadap sikap dan perilaku politik masyarakat. Di sisi lain, penelitian tentang partisipasi politik menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik struktural maupun individual.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam konteks Pilkada masih tergolong terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek elektabilitas, perilaku memilih, maupun faktor-faktor sosiodemografis pemilih. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu dengan memusatkan perhatian pada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Penelitian ini diharapkan mampu melengkapi sekaligus memperkaya kajian empiris mengenai demokrasi lokal dan perilaku politik masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui skema kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Hubungan antar variabel dalam penelitian ini dijelaskan melalui kerangka pemikiran yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan alur logis antara variabel independen dan variabel dependen yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Penyusunan kerangka pemikiran didasarkan pada fenomena empiris Pilkada calon tunggal, kajian teoritis, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi. Tingginya partisipasi menunjukkan adanya keterlibatan aktif dan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, sedangkan rendahnya partisipasi dapat mencerminkan kejenuhan politik, sikap apatis, maupun melemahnya legitimasi demokrasi. Pada Pilkada dengan calon tunggal, masyarakat tidak dihadapkan pada pilihan kandidat yang beragam sehingga dinamika partisipasi politik menjadi berbeda dibandingkan Pilkada yang bersifat kompetitif. Dalam situasi tersebut, figur calon, terutama

karisma kepemimpinan, menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku politik masyarakat.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemimpinan karismatik. Konsep kepemimpinan karismatik merujuk pada pemikiran Max Weber (1978) yang menyatakan bahwa karisma merupakan kualitas luar biasa yang melekat pada diri seorang pemimpin dan diakui oleh pengikutnya. Karisma memungkinkan seorang pemimpin memperoleh legitimasi bukan semata-mata karena jabatan formal, tetapi karena daya tarik personal, visi kepemimpinan, serta kemampuannya membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat. Dalam konteks politik elektoral, kepemimpinan karismatik tercermin dari tingkat popularitas, rekam jejak kepemimpinan, kemampuan komunikasi politik, serta kedekatan emosional dengan masyarakat.

Sikap dan persepsi politik masyarakat tersebut kemudian memengaruhi tingkat partisipasi politik sebagai variabel dependen dalam penelitian ini. Partisipasi politik dipahami sebagai keterlibatan warga negara dalam proses politik, khususnya dalam penggunaan hak pilih pada Pilkada. Konsep ini merujuk pada teori partisipasi politik Verba dan Nie (1972) yang menyatakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh sumber daya, motivasi, dan kesempatan yang dimiliki individu. Dalam konteks Pilkada calon tunggal, faktor motivasi dan kesempatan menjadi sangat penting karena terbatasnya alternatif pilihan dapat memengaruhi dorongan masyarakat untuk hadir di tempat pemungutan suara dan menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan kepemimpinan karismatik sebagai faktor utama yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat. Pengaruh tersebut tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga dimediasi oleh sikap dan persepsi politik masyarakat yang terbentuk melalui penilaian rasional terhadap figur calon dan kondisi Pilkada calon tunggal. Dengan demikian, semakin positif persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan karismatik, maka semakin tinggi pula kecenderungan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kabupaten Ciamis Tahun 2024. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis penelitian serta pengujian empiris hubungan antar variabel yang diteliti.

2. 4 Hipotesis

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *hupo* yang berarti sementara dan *thesis* yang berarti pernyataan atau teori. Oleh karena itu, hipotesis dapat dipahami sebagai pernyataan sementara yang kebenarannya masih perlu dibuktikan melalui penelitian. Para ahli mendefinisikan hipotesis sebagai dugaan atau asumsi mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih (Siregar, 2022).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif, yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang bertujuan mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2023). Hipotesis asosiatif digunakan untuk menjelaskan hubungan atau pengaruh antarvariabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesis asosiatif yang digunakan bersifat kausal, yaitu menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih

(Siregar, 2022). Dengan demikian, hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya melalui proses penelitian.

Penelitian ini menggunakan hipotesis alternatif yang untuk sementara dianggap benar dan selanjutnya akan diuji secara empiris melalui analisis data yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, hipotesis berfungsi sebagai pernyataan yang menjelaskan suatu fenomena sekaligus menunjukkan adanya hubungan antar variabel (Siregar, 2022). Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan karismatik dalam Pilkada terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Ciamis.

Ha diterima jika : $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel}$